

PROFIL KEMISKINAN

Provinsi DKI Jakarta
2022

<https://jakarta.bps>



PROFIL KEMISKINAN

Provinsi DKI Jakarta

2022



PROFIL KEMISKINAN

PROVINSI DKI JAKARTA 2022

ISSN/ISBN : -
Nomor Publikasi : 31000.2341
Katalog : 3205005.31

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : x+41 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Desain Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Diterbitkan Oleh : ©Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pencetak : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

TIM PENYUSUN

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI DKI JAKARTA 2022

Pengarah	: Dwi Paramita Dewi
Penanggung Jawab	: Dwi Paramita Dewi
Penyunting	: Dwi Paramita Dewi
Pengolah Data	: Theresia Parwati
Penulis Naskah	: Theresia Parwati
Penata Letak	: Vilda Tri Lestari Simbolon, Galuh Permata Sari
Infografis	: Vilda Tri Lestari Simbolon
Gambar Kulit	: Vilda Tri Lestari Simbolon

KATA PENGANTAR

Profil Kemiskinan DKI Jakarta 2022 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, berisi data tentang jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, karakteristik penduduk miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta Tahun 2022. Data-data tersebut merupakan hasil pengolahan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022. Publikasi ini menyajikan tabulasi dan grafik tingkat kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta serta tabulasi dan grafik karakteristik penduduk miskin di DKI Jakarta selama tahun 2022.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua kontributor, kami sampaikan terima kasih. Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai kalangan pengguna data untuk beragam keperluan. Tanggapan dan saran yang konstruktif kami harapkan dari para pembaca untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2023

Plt. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta



Dwi Paramita Dewi

DAFTAR ISI

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI DKI JAKARTA 2022

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
II. METODOLOGI	7
2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan	9
2.2. Indikator Kemiskinan	13
2.3. Distribusi dan Ketimpangan	14
III. Kemiskinan Jakarta	21
3.1. Perkembangan Kemiskinan di Jakarta, 2020-2022	23
3.2. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan	26
3.3. Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan	28
3.4. Perkembangan Distribusi Pengeluaran	29
IV. PROFIL KEMISKINAN	31
4.1. Pendidikan Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas	33
4.2. Kegiatan Bekerja Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas	34
4.3. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta, 2017-2022.....	24
Gambar 3.2 Garis Kemiskinan Jakarta, 2017-2022.....	25
Gambar 3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Jakarta, 2017-2022.....	26
Gambar 3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Jakarta, 2017-2022.....	27
Gambar 3.5 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Jakarta, 2017-2022.....	27
Gambar 3.6 Gini Ratio Jakarta, 2017-2022.....	29
Gambar 3.7 Distribusi Pengeluaran Penduduk Jakarta Menurut Kategori Bank Dunia, 2017-2022.....	30
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2022.....	34
Gambar 4.2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2022.....	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jenis Atap Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2020-2022.....	37
Tabel 4.2. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Jenis Dinding Terluas (%), 2020-2022.....	38
Tabel 4.3 Sumber Air Minum Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2020-2022.....	39
Tabel 4.4. Jenis Jamban Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2020-2022.....	40
Tabel 4.5. Status Kepemilikan Rumah menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2020-2022.....	41

BAB I

Pendahuluan

<https://jakarta.bps.go.id>



PENDAHULUAN

1 LATAR BELAKANG



Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

2 TUJUAN PENULISAN

- Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin
- Mengetahui karakteristik penduduk miskin
- Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan



Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara regional di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

3 RUANG LINGKUP



Bab I. Pendahuluan
Bab II. Metodologi
Bab III. Kemiskinan Jakarta
Bab IV. Profil Kemiskinan Jakarta

SISTEMATIKA PENULISAN 4



1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 1987, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Peringatan ini menjadi momen penting untuk mengingatkan dunia akan ketidaksetaraan ekonomi yang masih ada di banyak negara dan untuk mendorong tindakan konkret dalam mengatasi masalah ini. Melalui kesadaran dan kerjasama global, diharapkan bahwa kemiskinan dapat dihapuskan di masa depan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di berbagai belahan negara di dunia. Persoalah kemiskinan bahkan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Kemiskinan pada hakikatnya merupakan permasalahan nyata yang terkait dengan kondisi kehidupan masyarakat yang sulit dan bahkan bagi sebagian masyarakat yang kurang beruntung, kemiskinan adalah permasalahan kelangsungan hidup. Kemiskinan terjadi antara lain karena kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan harus diselesaikan secara nyata dan mendasar, tidak hanya dengan trik statistik dan manipulasi angka yang mengatasnamakan massa.

Pandemi Covid-19 yang telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019, telah menyebabkan melonjaknya kemiskinan hampir di seluruh wilayah. Kondisi kesejahteraan penduduk yang semula sudah berangsur membaik, dalam sekejap diluluh lantakkan dengan adanya Pandemi Covid-19. Selama periode 2000-2019 atau sebelum Pandemi Covid-19, angka

kemiskinan Jakarta sebenarnya sudah cenderung melandai. Persentase penduduk miskin tahun 2000 sebesar 4,96 persen turun menjadi 3,47 persen di tahun 2019. Namun, sejak Maret 2020 atau sejak Covid-19 mulai mewabah. Jumlah penduduk miskin bertambah pesat di sebagian besar wilayah.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan namun kenyataannya fenomena kemiskinan masih tetap ada. “Aspek kunci dalam mendukung strategi pengentasan kemiskinan adalah ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat diandalkan dapat menjadi alat yang ampuh bagi pembuat kebijakan untuk memusatkan perhatian pada kondisi kehidupan masyarakat miskin. Terakhir, data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah mengenai kemiskinan, membandingkan kemiskinan dari waktu ke waktu dan wilayah, dan menargetkan masyarakat miskin dalam upaya reformasi untuk memperbaiki kondisi mereka” (BPS, 2008a).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2004 telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1958 Tahun 2002 yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor 1791 Tahun 2004 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Aspek penting untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mencerminkan wajah kemiskinan dan membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan Penulisan publikasi ini antara lain untuk:

- a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022;
- b. Mengetahui karakteristik penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022;
- c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara regional di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Karakteristik penduduk miskin dan tidak miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk dan beberapa indikator kemiskinan lainnya juga disajikan dengan menggunakan data Susenas Panel Modul Konsumsi dan Kor pada Maret 2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang berbagai penelitian atau metodologi yang pernah dibangun dan disajikan pada publikasi sebelumnya sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan.

Bab III menjelaskan tentang kemiskinan di Jakarta, perkembangan

tingkat kemiskinan, perkembangan Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan.

Bab IV menjelaskan tentang Profil Kemiskinan di Jakarta berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan pada rumah tangga miskin di DKI Jakarta.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB II

Metodologi

<https://jakarta.bps.go.id>



METODOLOGI



1 METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).



2 INDIKATOR KEMISKINAN

- Head Count Index (HCI-P0)
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)
- Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)

- Koefisien Gini (*Gini Ratio*)
- Ukuran Bank Dunia
- Indeks Theil dan Indeks- L

3 DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN



2

METODOLOGI

2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

a. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret.

c. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum

untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran).

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/ sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan terhadap total pengeluaran komoditi/ sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPDKP 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas

modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non makanan atau Garis Kemiskinan Non Makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai Pengeluaran per komoditi/ sub kelompok non makanan daerah j dan provinsi p.

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan k menurut daerah (hasil SPDKP 2004) dan daerah j (kota + desa).

k = Jenis komoditi non makanan terpilih.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau pedesaan).

Garis Kemiskinan merupakan Penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin di provinsi p.

PM_p = Jumlah Penduduk Miskin di provinsi p.

P_p = Jumlah Penduduk di provinsi p.

2.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

$\alpha = 0,1,2$

z = Garis Kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk.

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha = 1$ diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan jika $\alpha = 2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (P_2).

2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

A: Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar dari X.

N: Jumlah penduduk total.

b: parameter yang nilainya antara 1 dan 2.

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk terkaya mendapatkan paling banyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini kemudian disebut sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini dilakukan dengan pendekatan melalui data

pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks -L.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i (Fc_i + Fc_{i-1})$$

GR = Koefisien Gini.

fp_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i.

fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i.

Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendataan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol, maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Loenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. garis diagonal mewakili pemetaan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemetaan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien gini bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata - rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah,

jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.

- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub kelompok masyarakat (sub group).

- Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan

pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/ sedang/ menengah.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

c. Indeks Theil dan Indeks- L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famli ukuran ketimpangan “*generalized enthropy*”. Ukuan tersebut secara umum ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

Dimana \bar{y} adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE(1) disebut sebagai Indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right),$$

- GE (0) juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari $\log(y)$:

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right)$$

BAB III

Kemiskinan Jakarta

<https://jakarta.bps.go.id>



KEMISKINAN JAKARTA

PROVINSI DKI JAKARTA 2022

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, 2017-2022



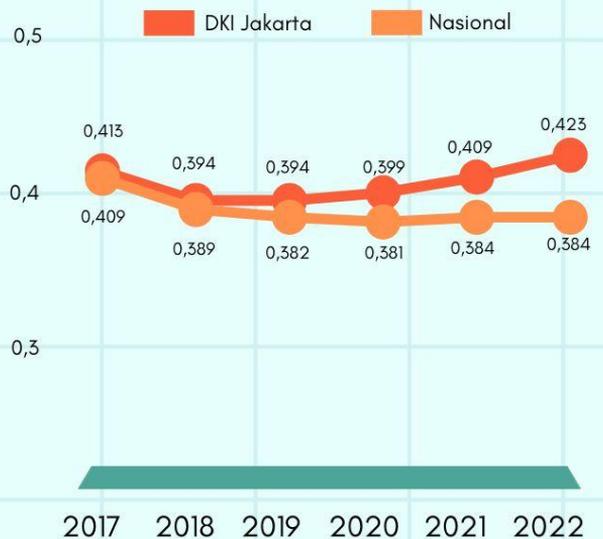
Garis Kemiskinan Jakarta, 2017-2022



Grafik Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Jakarta, 2019-2022



Gini Ratio Jakarta, 2017-2022



3

KEMISKINAN JAKARTA

3.1. Perkembangan Kemiskinan di Jakarta, 2017-2022

Sampai dengan saat ini, kemiskinan masih menjadi persoalan yang sangat lekat dengan keberadaan Jakarta sebagai kota metropolitan. Beragam bantuan dan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serta merta mengurangi kemiskinan di ibukota. Pandemi Covid-19 yang telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019, telah menyebabkan melonjaknya kemiskinan hampir di seluruh wilayah.

Kondisi kesejahteraan penduduk yang semula sudah berangsur membaik, kembali memburuk karena terdampak Covid-19. Selama periode 2000-2019 atau sebelum Pandemi Covid-19, angka kemiskinan Jakarta sebenarnya sudah cenderung melandai. Persentase penduduk miskin tahun 2000 sebesar 4,96 persen turun menjadi 3,47 persen di tahun 2019. Namun, sejak Maret 2020 atau sejak Covid-19 mulai mewabah. Jumlah penduduk miskin bertambah pesat di sebagian besar wilayah.

Potret kemiskinan di suatu wilayah dapat dilihat dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi. Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan (GK) untuk menghitung jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2022, besarnya GK adalah Rp 738.955 per kapita per bulan. Artinya bahwa penduduk yang pengeluaran perbulannya dibawah nilai tersebut, dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan

Maret 2022 mencapai 4,69 persen yang berarti mencakup sejumlah 502,04 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2021 (4,72 % atau 501,92 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat tipis sebesar 0,03 poin atau bertambah sekitar 0,12 ribu orang.

Gambar 3.1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta, 2017-2022



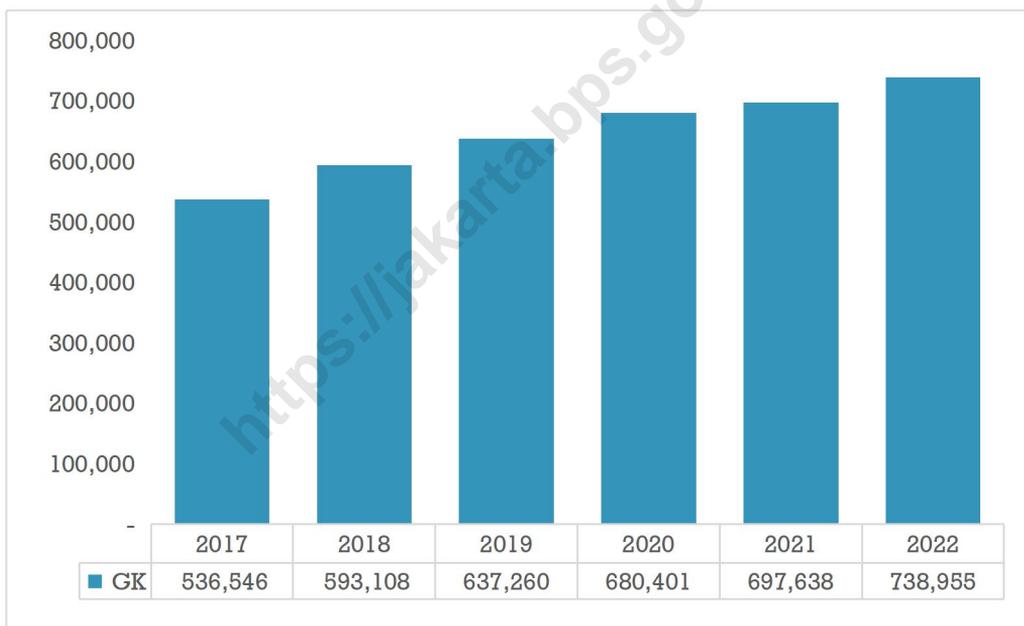
Sumber: Susenas Maret 2017-2022

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dibentuk dari komponen Makanan dan Non Makanan, yang kemudian disebut Garis Kemiskinan Makanan untuk komponen Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan untuk komponen Non Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per

kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar Non-Makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Gambar 3.2 Garis Kemiskinan Jakarta, 2017-2022



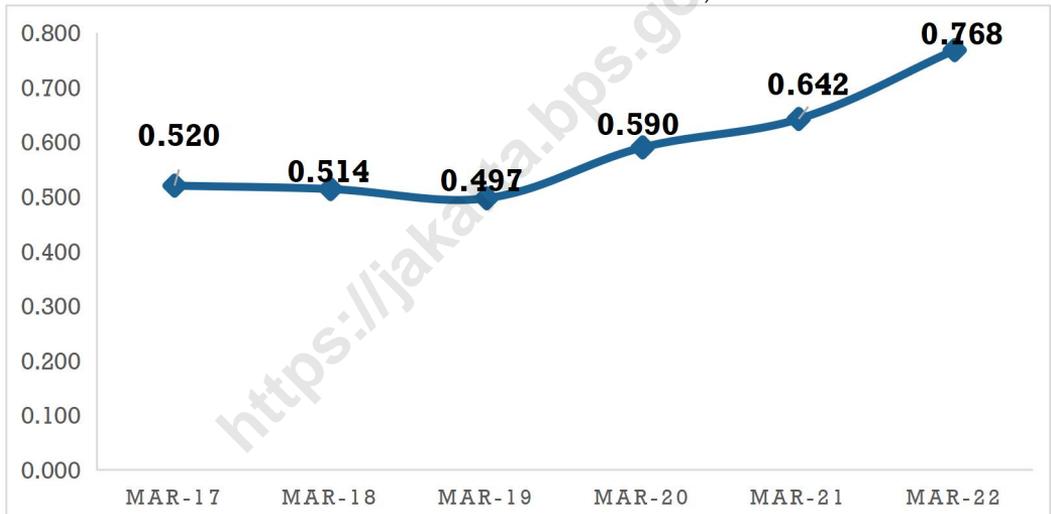
Sumber: Susenas Maret 2017-2022

Secara umum, besaran nilai garis kemiskinan (GK) selalu naik. Faktor inflasi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap naiknya nilai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 738.955 naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 697.638.

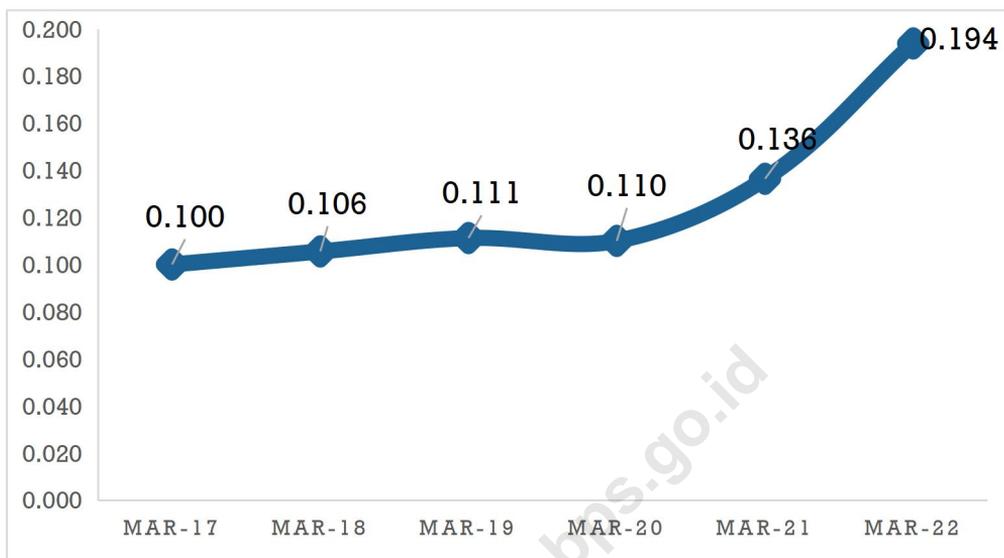
3.2. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

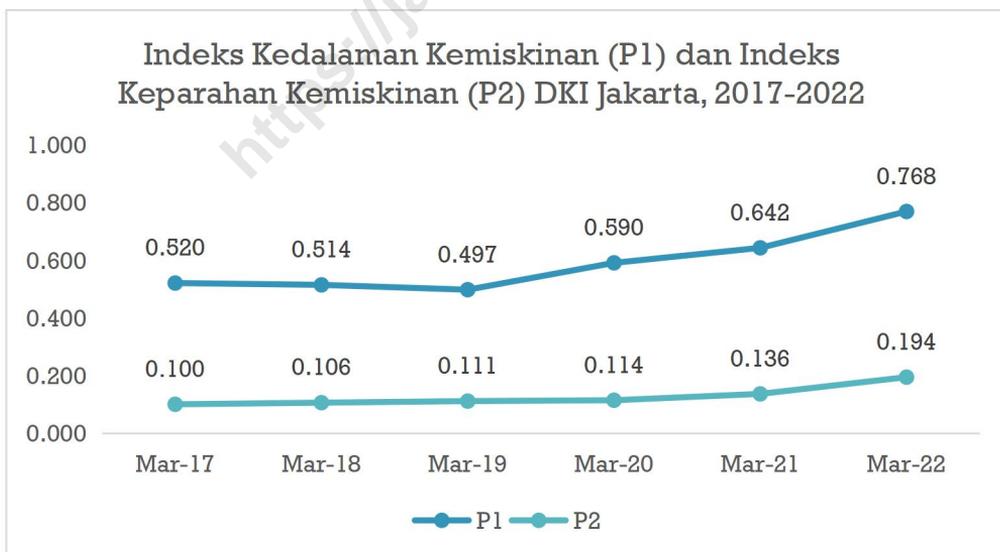
Gambar 3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Jakarta, 2017-2022



Gambar 3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Jakarta, 2017-2022



Gambar 3.5 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Jakarta, 2017-2022



Sumber: Susenas Maret 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P₁*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-

rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

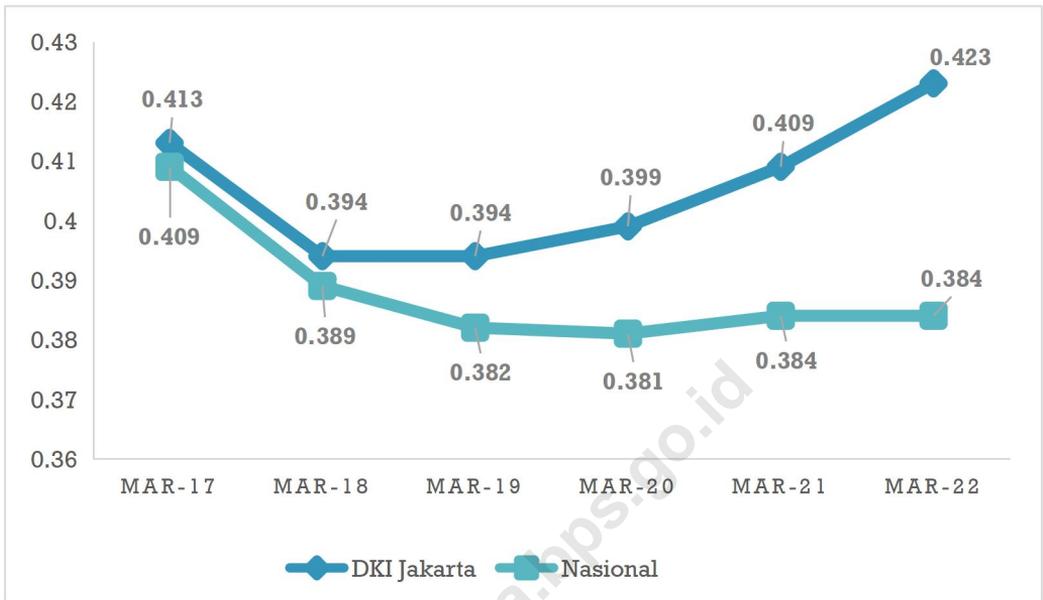
Pada periode Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P_2) menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,642 tahun 2021 menjadi 0,768 tahun 2022. Sementara itu Indeks Kearifan Kemiskinan juga turun dari 0,136 pada Maret 2021 menjadi 0,194 pada Maret 2022.

3.3. Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

a. Perkembangan Koefisien Gini Periode Maret 2017-2022

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Koefisien Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Koefisien Gini DKI Jakarta pada Maret 2022 adalah sebesar 0,423 atau naik 0,014 dibandingkan Maret 2021.

Gambar 3.6 Gini Ratio Jakarta, 2017-2022



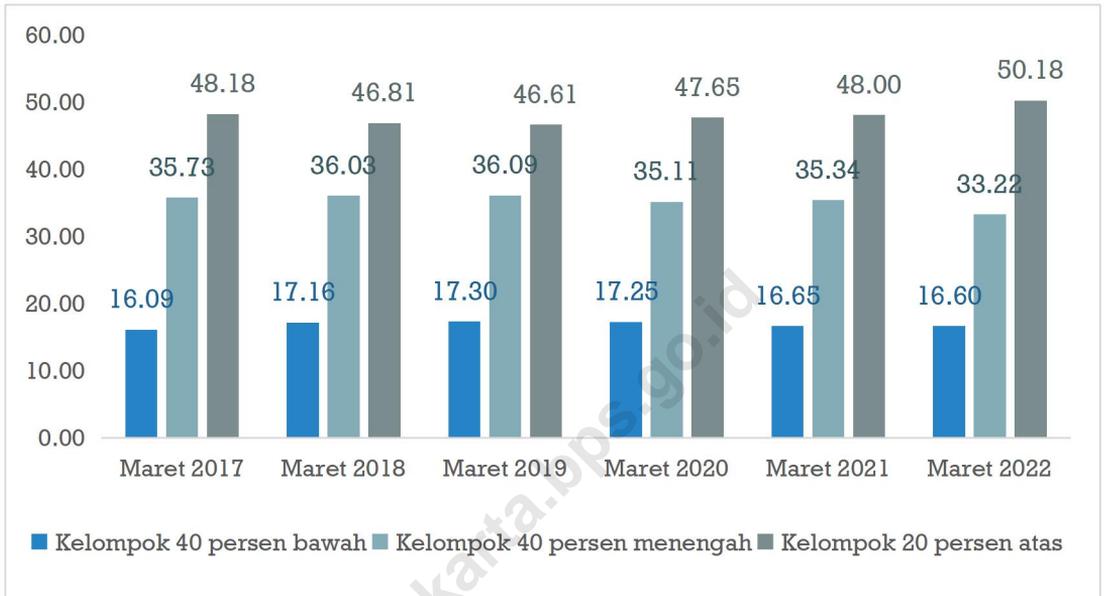
Sumber: Susenas Maret 2022

3.4. Perkembangan Distribusi Pengeluaran

Selain Koefisien Gini ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia.

Pada Maret 2022, persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 16,60 persen yang berarti pendapatan penduduk DKI Jakarta berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2022 ini turun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 sebesar 16,65. Begitu juga jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 17,25 persen.

Gambar 3.7 Distribusi Pengeluaran Penduduk Jakarta Menurut Kategori Bank Dunia, 2017-2022



Sumber: Susenas Maret 2022

BAB IV

Profil Kemiskinan

<https://jakarta.bps.go.id>

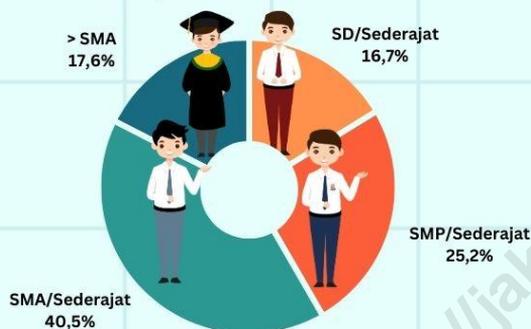


PROFIL KEMISKINAN

PROVINSI DKI JAKARTA 2022

PENDIDIKAN

Persentase **Penduduk Miskin** Usia 15 Tahun ke atas Menurut **Pendidikan** yang ditamatkan, di DKI Jakarta Tahun 2022



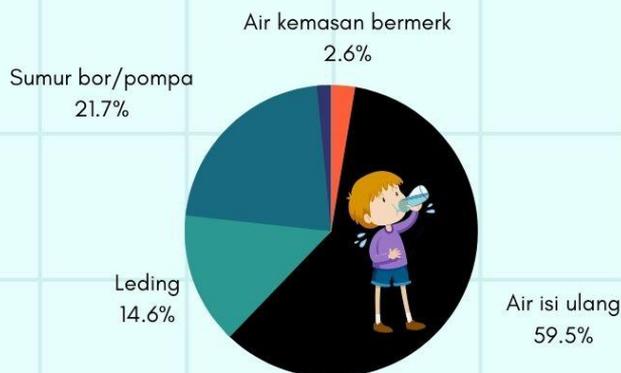
PEKERJAAN

Persentase **Penduduk Miskin** Usia 15 Tahun ke atas Menurut **Jenis Pekerjaan**, di DKI Jakarta Tahun 2022



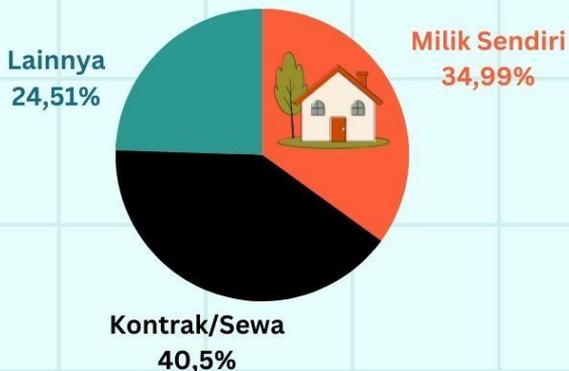
SUMBER AIR MINUM

Persentase **Sumber Air Minum** Rumah Tangga Miskin (%), 2022



STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

Persentase **Status Kepemilikan Rumah** dari Rumah Tangga Miskin (%), 2022



4

PROFIL KEMISKINAN

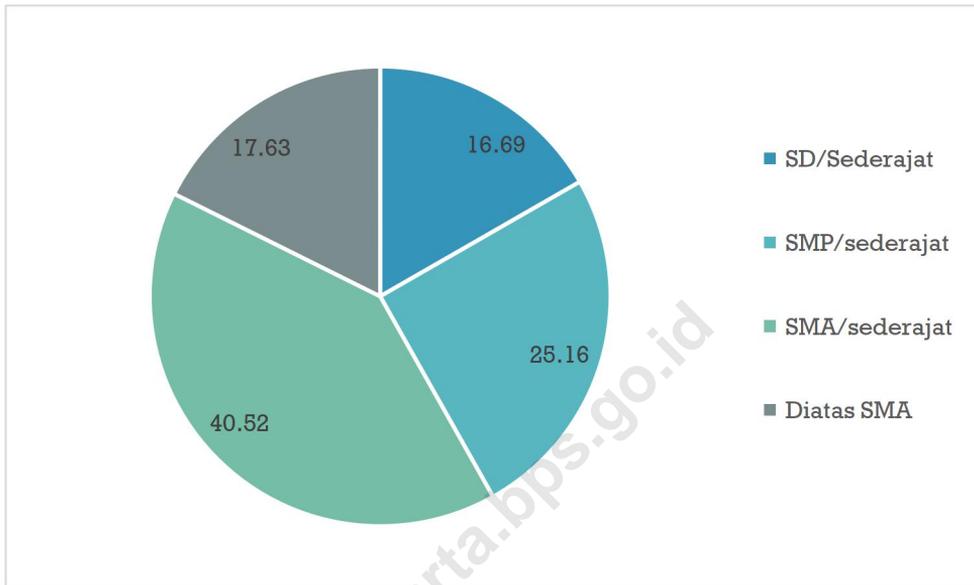
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

4.1. Pendidikan Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas

Tingkat pendidikan seseorang berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah distribusi persentase penduduk miskin berdasarkan pendidikan yang ditamatkannya.

Dari hasil olah Susenas Maret 2022, pendidikan yang paling banyak ditamatkan oleh penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas adalah tamat SMA keatas yaitu sebanyak 58,15 persen dan hanya 16,69 persen yang menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat tamat SD. Bahkan sebanyak 17,63 persen diantaranya sudah menamatkan pendidikan lebih dari SMA.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2022

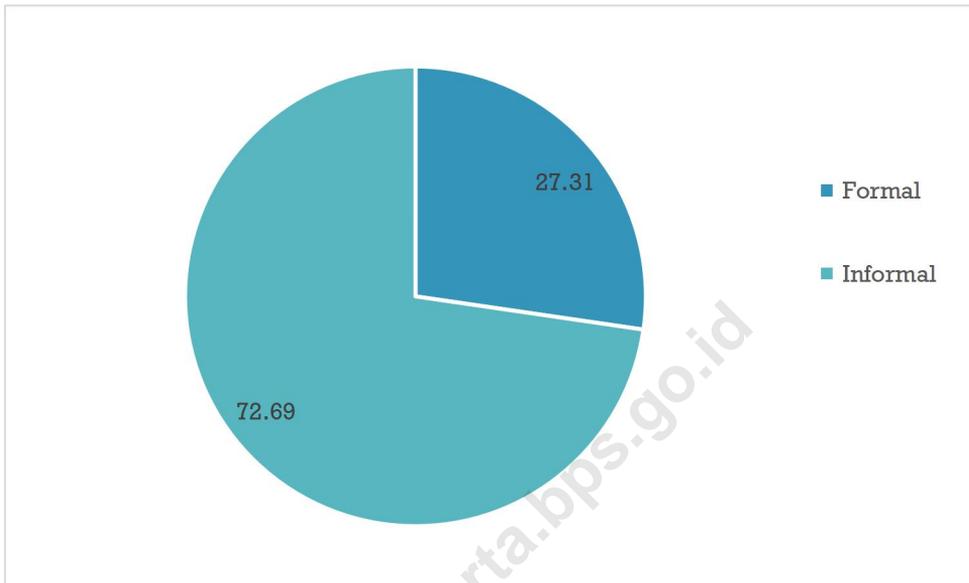


Sumber: Susenas Maret 2022

4.2. Kegiatan Bekerja Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor formal sebanyak 27,31 persen sementara yang bekerja di sektor informal sebanyak 72,69 persen.

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2022



Sumber: Susenas Maret 2022

Sukirno (2004), menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran/kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat yang turun karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan timbul kekacauan politik dan sosial dan mempunyai efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Suparno (2010) menemukan bahwa banyaknya pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di Indonesia.

4.3. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

Sudjana (1996) menyatakan rumah sebagai tempat tinggal beserta fasilitasnya harus memenuhi syarat-syarat yang layak untuk mendukung kehidupan dalam rangka pembangunan dari pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pada kenyataannya untuk dapat mewujudkan rumah yang memenuhi syarat tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Indikator perumahan dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga antara lain luas lantai, dinding, sumber air, jamban, dan status kepemilikan rumah tempat tinggal.

Ada beberapa alasan untuk menganalisis rumah tangga miskin daripada penduduk atau individu miskin. Pertama, kemiskinan pada hakikatnya merupakan cermin keadaan ekonomi rumah tangga. Kedua, apabila ditemukan data rumah tangga miskin maka intervensi terhadap rumah tangga akan lebih efektif dibandingkan dengan intervensi kemiskinan terhadap individu yang cenderung mengarah pada pandangan bahwa orang miskin memiliki karakteristik sebagai penyebab kemiskinannya

4.3.1 Jenis Atap

Jenis atap terluas rumah tangga miskin sebagian besar adalah atap asbes, yaitu sebesar 66,46 persen. Untuk kategori yang sama pada rumah tangga tidak miskin, hanya 51,36 persen.

Tabel 4.1 Jenis Atap Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2020-2022

Jenis Atap Terluas	2020		2021		2022	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Genteng	14,90	34,89	17,45	39,62	17,54	38,49
Asbes	79,84	57,37	75,61	53,40	66,46	51,36
Lainnya	5,26	7,75	6,93	6,98	16,00	10,15

Sumber: Susenas Maret 2020– 2022

4.3.2 Jenis Dinding

Berdasarkan jenis dinding terluas, sebesar 89,04 persen rumah tangga miskin dinding rumahnya terbuat dari tembok. Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yang mencapai 96,36 persen. Sementara rumah tangga miskin yang dindingnya dari kayu/papan masih ada sebesar 9,76 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin (2,81 persen).

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Jenis Dinding Terluas (%), 2020-2022

Jenis Dinding Terluas	2020		2021		2022	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tembok	93,11	96,14	87,62	96,84	89,04	96,36
Kayu/papan	5,74	3,05	11,22	2,90	9,76	2,81
Lainnya	1,15	0,81	1,16	0,26	1,20	0,83

Sumber: Susenas Maret 2020 – Susenas Maret 2022

4.3.2 Sumber Air Minum

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum merupakan indikator perumahan yang mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Ketidaktersediaan air bersih juga menjadi salah satu indikasi kemiskinan.

Tabel 4.3 Sumber Air Minum Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2020-2022

Sumber Air Minum	2020		2021		2022	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Air kemasan bermerk	7,26	41,00	2,56	35,49	2,63	32,54
Air isi ulang	62,48	38,00	62,37	44,15	59,52	44,88
Leding	12,71	9,00	16,24	8,05	14,58	6,71
Sumur bor/pompa	16,93	12,00	18,84	12,18	21,69	14,89
Sumur terlindung	0,59	0,00	0,00	0,12	1,57	0,68
Mata air terlindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Air hujan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Lainnya	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28

Sumber: Susenas Maret 2020 –2022

Sebagian besar 59,52 persen rumah tangga miskin menggunakan air isi ulang dan hanya 2,63 persen yang mengkonsumsi air kemasan bermerk untuk memenuhi kebutuhan air minum. Penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum relatif besar jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

4.3.3. Jenis Jamban

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal, dan jamban umum/tidak ada.

Tabel 4.4 Jenis Jamban Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2020-2022

Jenis Jamban	2020		2021		2022	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jamban Sendiri	72,44	84,82	73,22	89,38	73,95	89,53
Jamban bersama/komunal	18,93	12,22	20,77	8,27	16,45	8,38
Jamban Umum/Tidak ada	8,63	2,96	6,01	2,35	9,6	2,09

Sumber: Susenas Maret 2020 – 2022

Secara umum, baik rumah tangga miskin (73,95 persen) maupun rumah tangga tidak miskin (89,53 persen) sudah memiliki jamban sendiri. Namun persentase penggunaan jamban bersama/komunal di rumah tangga miskin (16,45 persen) lebih tinggi dibandingkan pada rumah tangga tidak miskin (8,38persen). Bahkan masih ada rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum karena tidak memiliki jamban yakni sebesar 9,6 persen. Artinya 9-10 diantara 100 rumah tangga miskin tidak memiliki jamban.

4.3.4 Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Status pemilikan rumah tempat tinggal dibedakan menjadi rumah sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain). Persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri di tahun 2022 sebesar 34,99 persen atau lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang sebesar 57,99 persen. Sementara rumah tangga miskin yang tinggal di rumah dengan status kontrak/sewa adalah sebesar 40,5 persen dan yang menempati rumah dengan status lainnya sebesar 23,99 persen.

Tabel 4.5 Status Kepemilikan Rumah menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2020-2022

Status Kepemilikan Rumah	2020		2021		2022	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik Sendiri	40,24	45,20	37,21	52,48	34,99	57,99
Kontrak/Sewa	34,04	37,83	39,38	30,65	40,5	23,99
Lainnya	25,72	16,97	23,41	16,86	24,51	18,42

Sumber: Susenas Maret 2020 – 2022

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No. 36-38 Paseban Senen Jakarta Pusat, 10440
Telepon: (021) 31928493, Fax: (021) 3152004,
E-mail : bps3100@bps.go.id, Homepage: <https://jakarta.bps.go.id/>